

Studi Kasus Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Imam Suleni², Gregorius N. Masdjojo³

^{1,2,3} Universitas STIKUBANK, Semarang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel perencanaan anggaran, kompetensi SDM, monitoring dan evaluasi terhadap variabel penyerapan anggaran, dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini menggunakan model penelitian asosiasi dengan pola hubungan sebab akibat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan terdiri dari 93 orang dari 31 SKPD di Kota Pekalongan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kepala Subbag Rencanaku dan Bendahara Pengeluaran (BP). Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan moderasi. Metode estimasi menggunakan pendekatan moderasi selisih mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan variabel monitoring dan evaluasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan anggaran. SIPKD memperlemah variabel perencanaan anggaran dan memperkuat variabel kompetensi SDM untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

Kata-kata Kunci: Perencanaan anggaran; kompetensi SDM; monitoring dan evaluasi; SIPKD; penyerapan anggaran

Copyright (c) 2023 Imam Suleni

✉ Corresponding author :

Email Address : imam@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan mengharuskan pemerintah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Anggaran public yang tidak berorientasi pada kinerja keuangan yaitu efektivitas dan efisiensi akan dapat menjadi gangguan dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan oleh SKPD. Dengan diterbitkannya PP nomor 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, maka pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan dan tata pemerintah yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam hal tata kelola keuangan daerah. Melalui Permendagri nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), diharapkan perencanaan pembangunan nasional dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah yang merupakan gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sekaligus penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan serta kesesuaian dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah (Permana & Riharjo, 2017).

Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator penilaian dalam LAKIP tersebut salah satunya adalah

besarnya penyerapan anggaran pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Proses perencanaan anggaran, tingkat kompetensi SDM/ aparatur pemerintah, pelaksanaan monitoring evaluasi program kegiatan merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap besarnya daya penyerapan anggaran pemerintah daerah. Perencanaan anggaran yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya akan berdampak terhadap pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran pemerintah tidak terserap optimal. Oleh karena itu, ketepatan dalam perencanaan anggaran diperlukan guna mendukung program kegiatan kepala daerah dalam mencapai visi misi yang diembannya.

Hasil penelurusan tentang capaian serapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun anggaran 2017 – 2021 (*audited*) dapat disajikan dalam table berikut:

Tabel 1.
Daftar Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2017-2021

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1.	2017	1.016.990.454.000,00	924.172.718.082,00	90,87
2.	2018	980.002.459.000,00	883.184.894.707,00	90,12
3.	2019	1.050.112.414.000,00	954.379.012.827,00	90,89
4.	2020	1.012.737.890.000,00	944.840.460.675,56	93,30
5.	2021	1.041.206.081.000,00	962.091.792.004,00	92,40

Sumber: LKPD Kota Pekalongan (www.tpad.pekalongankota.go.id)

Dari table 1 didapati penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan sudah baik, namun belum optimal. Dari informasi yang didapat, anggaran yang tidak terserap berasal dari belanja gaji pegawai dan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK). Factor utama yang mempengaruhi adalah perencanaan anggaran yang merupakan estimasi mengenai kinerja yang hendak dicapai dalam rentang periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk finansial(Nanda, 2016). Sedangkan ketepatan dalam mengestimasi anggaran sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi SDM/ aparatur pemerintah. Sebab itu dibutuhkan SDM yang visioner dalam membaca arah kebijakan kepala daerah yang diakomodir dalam program kegiatan. Semakin baik kualitas SDM yang dimiliki maka akan dapat mempercepat tingkat penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah(Hasni, 2016). SDM yang berkualitas perlu didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah, teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam mempercepat proses transaksi, penatausahaan dan pelaporan keuangan negara. Sampai tahun 2011 pemerintah belum mempunyai mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaporan keuangan yang disusun, sehingga hal tersebut menyulitkan APIP dalam memberikan penilaian dan koreksi apabila ada kekeliruan dalam menyajikan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan langkah untuk mencapai *outcome*(Boediono, 2011).

Penelitian sebelumnya terkait variabel penelitian hubungannya dengan variabel penyerapan anggaran dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Variabel	Berpengaruh	Tidak berpengaruh
1.	Perencanaan anggaran (PA)	(Ratag et al., 2019), (Zarinah et al., 2016), (Ferdinan et al., 2020), (Ramdhani & Anisa, 2017)	(Rifai et al., 2016)
2.	Kompetensi SDM (SD)	(Alumbida et al., 2016), (Ulandari et al., 2021), (Aldita & Muniruddin, 2018)	(Harahap & Taufik, 2020)

3.	Monitoring dan evaluasi (ME)	Belum ada penelitian	Belum ada penelitian
4.	SIPKD (SI) sebagai variabel moderasi	Belum ada penelitian	Belum ada penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, didapati tujuan penelitian ini adalah untuk:

Menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran;

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran;
2. Menguji dan menganalisis pengaruh monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran;
3. Menguji dan menganalisis pengaruh SIPKD memoderasi perencanaan terhadap penyerapan anggaran; dan
4. Menguji dan menganalisis pengaruh SIPKD memoderasi kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran.

KAJIAN PUSTAKA

Teori yang mendasari dalam penelitian adalah *Stewardship Theory* dan Teori Anggaran Sektor Publik. Dalam *Stewardship Theory*, ditegaskan bahwa kepentingan bersama yang dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan oleh manajer dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai *Steward*. Misal terdapat terdapat perbedaan kepentingan antara *steward* dengan *Principal*, maka *steward* akan berusaha sebisa mungkin untuk bekerja sama dan bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional demi tercapainya tujuan bersama (Raharjo, 2007). Anggaran sector public adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sector public merupakan rencana financial pemerintah yang dinyatakan dalam rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga sector public yang direpresentasikan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter (Priatna & Nuraisyah, 2018).

Sebagai pedoman pelaksanaan kerja, pemerintah daerah bersama legislatif (DPRD) Bersama-sama menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Permendagri RI nomor 13/2006, APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam APBD meliputi fungsi perencanaan anggaran, pengendalian kebijakan, politik, organisasi, evaluasi kinerja, motivasi manajemen dan penciptaan ruang public (Mardiasmo, 2018).

Menurut Permendagri nomor 59/2007 yang merupakan perubahan atas Permendagri 13/2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan menurut Undang-undang nomor 23/2014 adalah keseluruhan aktivitas keuangan yang berisi hak dan kewajiban yang dinilai dari uang maupun barang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sumber daya manusia atau *Human Resources* mempunyai pengertian bahwa sumber daya manusia sebagai usaha kerja atau usaha jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan pada seseorang dalam kurun waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Terkait manusia yang

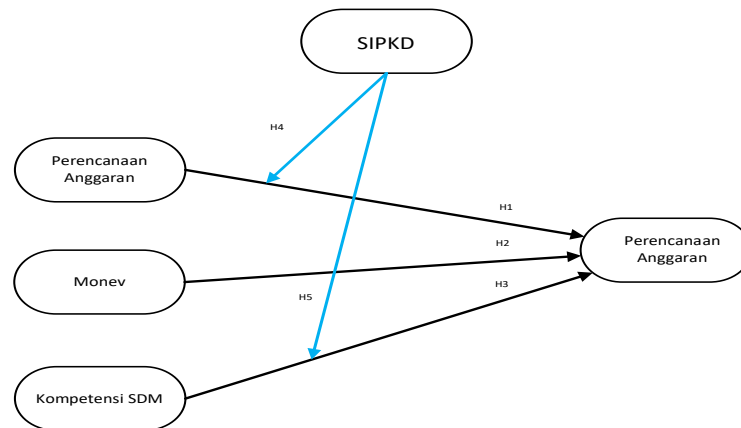
mampu bekerja, mampu melakukan kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat (Sumarsono, 2003). Kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan berupa keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan seorang atasan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Tiga komponen pembentuk kompetensi manusia adalah pengetahuan, kemampuan dan perilaku individu (Hutapea & Nuriana, 2008).

Undang-undang nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan mengamanatkan perlu adanya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan instansi pemerintah. Monitoring merupakan tahapan dari suatu proses yang biasa berjalan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap sesuatu kebijakan yang telah direncanakan dengan hasil yang ingin dicapai (Suliantoro, 2020). Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat dinilai, dipelajari dan dianalisis untuk dilakukan perbaikan atau perubahan arah yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya. Dalam perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan indikator pelaksanaan rencana yang meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat (Taufik, 2013).

Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam menghimpun data keuangan daerah. SIPKD merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah, efektivitas dan efisien dalam penggunaan anggaran sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Pemerintah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif terutama mengenai laporan posisi keuangan daerah. Mengacu pada Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, produk yang dibuat bukan hanya beroperasional secara fungsionalitanya, namun harus dapat mengintegrasikan sistem lainnya yang terkait. Dalam upaya mengoptimalisasikan penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah, memperkuat perencanaan anggaran seperti ketepatan pengalokasian waktu dan penentuan program kegiatan yang mendukung visi dan misi kepala daerah perlu dilakukan agar perencanaan anggaran dan pelaksanaan penganggaran dapat berjalan dengan lancar. Selain itu sistem informasi terkait pengelolaan keuangan (SIPKD) berpengaruh besar dalam mendukung tingkat penyerapan anggaran.

Dari uraian yang peneliti kemukakan diatas, rancangan kerangka berpikir yang dapat peneliti sajikan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Berpikir penelitian



Dari kerangka berpikir diatas, pengambilan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa perencanaan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Ramdhani & Anisa, 2017). Penelitian lainnya yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Ferdinan et al., 2020). Hal ini berarti semakin meningkatnya satuan perencanaan anggaran akan meningkatkan penyerapan anggaran. Berdasar uraian diatas, hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

H1 : perencanaan anggaran (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y)

2. Pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran.

Undang-undang 22/1999 pasal 8 secara implisit menyebutkan bahwa desentralisasi kekuasaan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (Alumbida et al., 2016). Oleh karena, pengelolaan SDM harus diarahkan agar tercapai efektivitas dan efisiensi demi tercapainya tujuan organisasi. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah dilakukan oleh Aldita & Aminuddin, Hasni, Ulandari et al. Penelitian dengan hasil bertolak belakang dilakukan oleh Harahap et al., yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negative terhadap penyerapan anggaran.

H : Kompetensi SDM (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y)

3. Pengaruh monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran

Dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal supaya pengalokasian anggaran yang diperuntukan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian pengaruh monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran belum pernah dilakukan. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : monitoring dan evaluasi (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran (Y)

4. Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kota Pekalongan.

Perencanaan anggaran yang baik akan dapat meningkatkan daya serap penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran, sehingga dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Optimalisasi kinerja keuangan akan tercapai apabila didukung oleh suatu system informasi yang dapat menguatkan indikator yang mempengaruhi serapan anggaran pemerintah daerah. Belum ada penelitian terkait system informasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (SIPKD) sebagai variabel moderasi. SIPKD harus dapat mengintegrasikan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan monitoring dan evaluasi kegiatan, sehingga kinerja keuangan pemerintah dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Dari uraian diatas, diduga bahwa hipotesa yang dapat disajikan adalah sebagai berikut

H4 : sistem informasi keuangan daerah (Z) memoderasi pengaruh perencanaan anggaran (X1) terhadap penyerapan anggaran (Y)

5. Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah memoderasi pengaruh kualitas SDM terhadap penyerapan anggaran di Kota Pekalongan

Pada setiap OPD sudah menjadi suatu keharusan untuk memiliki SDM yang memiliki skill terlatih serta mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut (Putra et al., 2021). Dalam memaksimalkan peran dan kompetensi pegawai, peran system informasi pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan guna mencapai indikator kinerja keuangan. System informasi yang dibangun saat ini tidak hanya menyajikan output dari laporan keuangan, namun juga merefleksikan kinerja perencanaan anggaran dan evaluasi keuangan pemerintah daerah. Atas pertimbangan dan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5 : sistem informasi keuangan daerah (Z) memoderasi pengaruh kompetensi SDM (X2) terhadap penyerapan anggaran (Y)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan hubungan kausal. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada sampel tertentu, pengumpulan data melalui instrument penelitian, Analisa data bersifat kuantitatif statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011).

Pemilihan populasi dalam penelitian ini adalah pegawai OPD Kota Pekalongan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Sumber informasi diambil dari kepala OPD, kasubbag renval dan keuangan, bendahara, dan perencanaan kegiatan sebanyak 269 orang. Sampel adalah bagian dari tingkat keseluruhan karakteristik yang dimiliki dalam suatu populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2016). Sampel diambil sebanyak 93 orang yang terdiri dari:

1. Kepala OPD selaku pengguna anggaran;
2. Kasubbag Renval dan keuangan sebagai pejabat perencanaan; dan
3. Bendahara sebagai pengelola keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik secara individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner seperti yang dilakukan oleh para peneliti (Umar, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner

yang dibagikan kepada responden. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.

Instrument penelitian menggunakan Skala Likert lima poin, yaitu mulai dari point 5 untuk pendapat sangat setuju dan 1 untuk pendapat sangat tidak setuju.

Tabel 3.

Skala Likert

Skala	Deskripsi	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, mendeskripsikan data responden seperti jabatan, tingkat Pendidikan, usia, dan lama bekerja. Uji kualitas data menggunakan:

1. Uji Validitas, yaitu mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika memiliki nilai $r > 0,30$ (Sugiyono, 2011).
2. Uji Realibilitas, Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator atau *construct*, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan bantuan SPSS, yang akan memberikan fasilitas berupa pengukuran reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu Construct dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$ (Ghozali, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan antara lain:

1. Uji asumsi klasik
 - a. Uji normalitas, Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, antara variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai hubungan atau sebaran yang normal atau tidak. Normalitas dapat diuji dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan, atau diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2016)
 - b. Uji Multikolinearitas, Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah antar variabel bebas dalam regresi terdapat hubungan antar variabel. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi hubungan antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan *Variance Inflation Faktor* (VIF). Kedua ukuran inilah yang dapat menunjukkan setiap variabel bebas ditunjukkan oleh variabel lainnya. Semua variabel bebas dalam regresi harus mempunyai nilai toleransi diatas 10% dan menunjukkan nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, 2016).
 - c. Uji Heteroskedastisitas, Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar dalam pengambilan keputusan uji glejser yaitu, tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$ dan terjadi heteroskedastisitas apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$
2. Uji regresi linier berganda dengan pendekatan selisih mutlak

Frucot & Shearon dalam (Ghozali, 2016) mengajukan model regresi dengan metode selisih mutlak dari variabel independent. Ekspektasi sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara variabel independen (perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), Monitoring dan evaluasi (X3), Kompetensi SDM (X4)), variabel moderasi (Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Z)) dan variabel dependent (berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Y)). Rumusan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tergantung dan interaksinya terhadap variabel moderating adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + [X_1-Z] + [X_2-Z] + e$$

Keterangan:

Y	=	Penyerapan anggaran
α	=	konstanta
X1	=	Perencanaan anggaran
X2	=	Kompetensi SDM
X3	=	Monitoring dan Evaluasi
[X1-Z]	=	nilai mutlak selisih antara X1- Z
[X2-Z]	=	nilai mutlak selisih antara X2- Z
β_1 - β_3	=	koefisien regresi berganda
e	=	error

3. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R-Squared) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R² bernilai besar (mendeteksi 1), berarti variabel bebas dapat menerangkan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R² bernilai kecil (mendeteksi 0), maka variabel bebas dalam menjelaskan variabel bergantung sangat terbatas (Ghozali, 2016).
2. Uji Statistik F adalah pengujian terhadap variabel independent yang dilakukan secara bersama-sama yang ditujukan untuk mengetahui apakah variabel independent secara Bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen (Santoso, 2006). Dalam penelitian ini, uji F dilihat dengan melihat output SPSS v.26 (table anova) dan dibandingkan dengan F table, dengan *level of significance* adalah sebesar 0,05 atau 5%
3. Uji T, Uji T pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien regresi. Jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dapat menerangkan variabel dependen. dalam penelitian ini, uji T dilihat dengan membandingkan t hitung dengan t table dengan *level of significance* sebesar 5%

HASIL

Deskripsi responden merupakan informasi secara umum dari para responden mengenai karakteristik data dengan menggunakan *absolute frequency* atau proporsional (persentase),

berdasar Jabatan, lama bekerja, Umur, jenis kelamin dan tingkat Pendidikan. Responden penelitian terdiri dari Pengguna Anggaran/ PPK, Kasubbag renval dan Keuangan dan Bendahara yang berjumlah 93 orang. Data distribusi penyebaran kuesioner, pengembalian kuesioner dan kuesioner yang dapat diolah, seperti yang dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 4.
Distribusi Penyebaran dan Pembagian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Persentase
1	Distibusi kuisisioner	93	100%
2	Kuisisioner Kembali	87	93,55%
3	Kuisisioner tidak Kembali	6	6,45%
4	Kuisisioner tidak dapat diolah	0	0%
5	Jumlah kuisisioner yang diolah	87	100%

Karakteristik data responden terdiri dari jabatan responden, lama bekerja, usia responden, jenis kelamin, dan tingkat Pendidikan disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 5.
Deskripsi Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jabatan	Pengguna Anggaran/ PPK	27	31,03%
	Kasubbag Renvalkeu	29	33,33%
	Bendahara	31	35,63%
Lama Bekerja	1 -10 tahun	9	10,34%
	11 - 20 tahun	44	50,57%
	diatas 20 tahun	34	39,08%
Usia	18 - 27 tahun	3	3,45%
	28 - 37 tahun	6	6,90%
	38 - 47 tahun	45	51,72%
	48 - 57 tahun	29	33,33%
	diatas 57 tahun	4	4,60%
Jenis Kelamin	Laki - laki	51	58,62%
	Perempuan	36	41,38%
Tingkat Pendidikan	SMA Sderajat	13	14,94%
	D3	5	5,75%
	S1	47	54,02%
	S2	19	21,84%
	S3	3	3,45%

Deskripsi variabel adalah perhitungan tentang *absolute distribution frequency* dan proporsi (*percentage*) mengenai jawaban responden untuk masing-masing indikator. Deskripsi variabel dari 87 responden dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 6.
Deskripsi Variabel

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	87	48	60	54,14	3,390
Sumber daya Manusia	87	31	45	39,33	3,765

Monitoring dan Evaluasi	87	43	55	49,77	3,634
SIPKD	87	27	44	38,28	3,824
Penyerapan Anggaran	87	35	50	43,41	3,975
Valid N (listwise)	87				

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan masing-masing indikator. Indikator memenuhi kecukupan sampel untuk menjadi sebuah variabel jika mempunyai nilai *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)* dan *Bartlett Test Of Sphreriscity* $> 0,5$ dan menunjukkan Signifikasi $< 0,05$ (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasil uji validitas menggunakan SPSS v.26 untuk masing-masing indikator:

Tabel 7.

Hasil Uji KMO and Bartletts Test masing-masing variabel

Indikator	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy	Bartlett's Test of Sphericity		
		Approx. Chi-Square	Df	Sig.
Perencanaan anggaran (X1)	0,760	759,784	66	0,000
Kompetensi SDM (X2)	0,797	278,610	36	0,000
Monitoring dan evaluasi (X3)	0,769	839,190	55	0,000
SIPD (Z)	0,752	223,426	36	0,000
Penyerapan anggaran (Y)	0,733	554,152	46	0,000

Dari table 7, Uji *KMO and Bartletts Test* masing-masing variabel dengan Signifikansi semua 0,000 atau dibawah 0,05 dan nilai *KMO Measure of Sampling Adequacy* diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembentuk yang diajukan untuk penelitian sudah baik dan mencukupi.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari kuesioner yang dibagikan untuk mengukur berpengaruh tidaknya variabel perencanaan anggaran, kompetensi SDM, monitoing dan evaluasi, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) terhadap penyerapan anggaran. Uji reliabilitas dilakukan dengan *Crobach's Alpha*, jika *Crobach's Alpha* $> 0,6$ dapat dikatakan bahwa kuisioner tersebut reliable atau konsisten. Berikut disajikan hasil uji reliabilitas sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 8.

Uji Reliabilitas menggunakan Crobach's Alpha

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Kategori
Perencanaan Anggaran (X1)	0,807	Reliabel
Kompetensi SDM (X2)	0,825	Reliabel
Monitoring dan Evaluasi (X3)	0,875	Reliabel
SIPKD (Z)	0,780	Reliabel
Penyerapan Anggaran (Y)	0,862	Reliabel

Berdasar table 8. diatas, diketahui hasil uji *Crobach's Alpha* diatas 0,6, dengan nilai untuk masing-masing variable perencanaan anggaran sebesar 0,807. Variabel kompetensi SDM sebesar 0,825. Variable monitoring dan evaluasi sebesar 0,875. Variable Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebesar 0.780 dan variable penyerapan anggaran sebesar 0,862.

Sebelum dilakukan pengujian regresi harus dilakukan uji normalitas, yaitu pengujian terhadap tingkat distribusi data dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji dikatakan normal jika *Asymp Sig. (2 tailed)* lebih dari 0,05. Jika hasil uji *Asymp Sig. (2 tailed)* kurang dari 0,05 maka sebaran data tidak terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*:

Table 9.

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	1.42541214
Most extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.154 ^c

Proses uji normalitas ini menggunakan data responden 93 orang yang diolah dengan SPSS v.26. Proses uji normalitas dilakukan dengan mengeluarkan outlier, sehingga data yang terdistribusi normal sebanyak 87 responden. Berdasar table diatas, didapati hasil signifikansi pada table 9. nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,154 atau lebih besar dari 0,05, artinya nilai residual model regresi tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linier. Apabila terjadi keadaan ini, kita akan kesulitan untuk membedakan pengaruh dari masing-masing variabel. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi atau Variance Inflation Faktor (VIF). Batas nilai dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransi adalah >0,1 atau VIF <10. Hasil pengujian multikolinearitas dapat disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 10.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Asumsi Multikolinearitas
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Perencanaan Anggaran	.129	7.733	tidak terjadi multikolinearitas
Sumber daya Manusia	.159	6.282	tidak terjadi multikolinearitas
Monitoring dan Evaluasi	.319	3.133	tidak terjadi multikolinearitas
MOD_1	.185	5.397	tidak terjadi multikolinearitas
MOD_2	.663	1.509	tidak terjadi multikolinearitas

a. Dependent Variable: Penyerapan_Anggaran

Berdasar table 10. diatas, diketahui bahwa nilai VIF untuk semua variable independent tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variable perencanaan anggaran, kompetensi SDM, monitoring dan evaluasi dan variable Sistem informasi pengelolaan Keuangan Dawerah (SIPKD) tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser, yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka persamaan regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas, yaitu bila nilai signifikansi korelasi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas seperti yang ditampilkan dalam table 11. berikut ini:

Tabel 11.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,917	1,672		1,146	0,255
Perencanaan Anggaran	-0,077	0,085	-0,257	-0,915	0,363
Sumber daya Manusia	-0,067	0,069	-0,247	-0,975	0,333
Monitoring dan Evaluasi	0,095	0,050	0,339	1,895	0,062
MOD_1	0,069	0,067	0,242	1,031	0,306
MOD_2	0,041	0,085	0,061	0,488	0,627

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

Dari table 11. diatas, nilai signifikansi untuk variabel perencanaan anggaran adalah 0,363, sedangkan variabel kompetensi SDM adalah 0,333. Nilai signifikansi untuk variabel monitoring dan evaluasi adalah 0,062. Nilai signifikansi untuk variabel perencanaan anggaran yang dimoderasi SIPKD adalah 0,306. Signifikansi variabel kompetensi SDM yang dimoderasi variabel SIPKD adalah 0,627. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi karena nilai signifikansinya diatas 0,05 atau 5%.

Uji F dilakukan untuk melakukan pengujian signifikansi pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi SDM dan Monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran. Berikut ini disajikan hasil Uji F:

Table 12.

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1184,369	5	236,874	109,805	.000 ^b
Residual	174,735	81	2,157		
Total	1359,103	86			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), MOD_2, Perencanaan Anggaran, MOD_1, Monitoring dan Evaluasi, Sumber daya Manusia

Berdasar table 12 diatas, diketahui bahwa hasil uji F sebesar 1184,369 dengan tingkat probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi 0,050. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam melihat

variabel perencanaan anggaran, kompetensi SDM, monitoring dan evaluasi memenuhi *goodness of fit* model (kesesuaian terhadap penyerapan anggaran)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen. Di bawah ini disajikan hasil uji Koefisien Determinasi menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 13.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.934a	0,871	0,863	1,469

a. Predictors: (Constant), MOD_2, Perencanaan Anggaran, MOD_1, Monitoring dan Evaluasi, Kopetensi Sumber daya Manusia

Berdasarkan table 13 di atas, diketahui bahwa hasil uji *Adjusted R Square* sebesar 0,863 yang membuktikan bahwa variabel independent menjelaskan variabel dependen sebesar 13,7%. Dan 86,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya.

Pengujian regresi moderasi digunakan dalam membuktikan variable Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat mempengaruhi perencanaan anggaran dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap penyerapan anggaran. Analisa yang dibangun melibatkan variable moderasi dalam persamaan regresinya dalam membangun model hubungan. Analisa regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode selisih mutlak pure. Berikut ini disajikan hasil pengujian regresi moderasi menggunakan SPSS:

Tabel 14

Hasil Uji Analisa Regresi Moderasi Dengan Metode Selisih Mutlak Pure

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-2.496	2.565		-.973	.334
	Perencanaan Anggaran	.655	.130	.559	5.045	.000
	Kompetensi SDM	.305	.105	.289	2.892	.005
	Monitoring dan evaluasi	.127	.077	.116	1.646	.104
	MOD1	-.538	.103	-.485	-5.241	.000
	MOD2	.408	.130	.153	3.130	.002

Berdasarkan tabel 14 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi dari setiap variable perencanaan anggaran, kompetensi SDM dan Monitoring dan evaluasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai variabel moderasi didapati persamaan regresi linier berganda dengan metode selisih mutlak pure adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,655 X_1 + 0,305 X_2 + 0,127 X_3 - 0,538 \text{ MOD1} + 0,408 \text{ MOD2}$$

Keterangan:

Y	=	Penyerapan anggaran
X1	=	Perencanaan anggaran
X2	=	Kompetensi SDM
X3	=	Monitoring dan Evaluasi
MOD1	=	nilai mutlak selisih antara X1- Z
MOD2	=	nilai mutlak selisih antara X2- Z

Hasil uji hipotesis digunakan dalam melihat pengaruh variabel perencanaan anggaran, variabel kompetensi SDM dan variabel monitoring dan evaluasi terhadap variabel dependen penyerapan anggaran setelah dilakukan uji hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama (H1) adalah variabel perencanaan anggaran mempunyai nilai t hitung sebesar 5.045. lebih besar dari t table dengan nilai signifikansi 0,05 dan $df = n-k$, yaitu $87-3 = 84$ sebesar 1,663 dengan nilai Sigfikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,655 sehingga Hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel dependen penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.
2. Hipotesis kedua (H2) adalah variabel kompetensi SDM mempunyai nilai t hitung sebesar 2,892. Lebih besar daripada t table dengan nilai signifikansi 0,05 dan $df = n-k$, yaitu $87-3 = 84$ sebesar 1,663. Nilai Sig. sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,305. Hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel dependen penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.
3. Hipotesis ketiga (H3) adalah variabel monitoring dan evaluasi dengan nilai t hitung sebesar 1,646. Lebih kecil daripada nilai t table dengan signifikansi 0,05 dan nilai $df = 84$ = 1,663 nilai Sig. sebesar 0,104 atau lebih besar dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,127 sehingga Hipotesis ketiga dinyatakan ditolak. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel monitoring dan evaluasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel monitoring dan evaluasi (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Y).
4. Hipotesis keempat (H4) adalah variabel moderating MOD1 (selisih mutlak pure X1-Z) signifikan dengan nilai koefisien regresi (*standardized coefficients*) sebesar -0.538 dengan nilai Signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar -0,485 sehingga Hipotesis keempat dinyatakan diterima.
5. Hipotesis kelima (H5) adalah variabel moderasi MOD2 (selisih mutlak pure X2-Z) signifikan dengan nilai koefisien regresi (*standardized coefficients*) sebesar 0,408 dengan nilai Sig. sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Hipotesis kelima dinyatakan diterima.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran mempunyai nilai t hitung sebesar 5.045. lebih besar dari t table dengan nilai signifikansi 0,05 dan $df = n-k$, yaitu $87-3 = 84$ sebesar 1,663 dengan nilai Sigfikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,655 sehingga Hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel dependen penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

penyerapan anggaran di Kota Pekalongan akan meningkat jika diiringi oleh perencanaan anggaran yang baik. Hasil uji itu juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zarinah et al., Ra,tag et al. Ferdinan et al., dan Ramdhani & Anisa menyatakan bahwa perencanaan anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah.

2. Pengaruh variabel kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran mempunyai nilai t hitung sebesar 2,892. Lebih besar daripada t table dengan nilai signifikansi 0,05 dan $df = n-k$, yaitu $87-3 = 84$ sebesar 1,663. Nilai Sig. sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,305. Hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel dependen penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Hal ini berarti, semakin baik atau meningkatnya kompetensi SDM pengelola keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, maka semakin tinggi tingkat penyerapan anggaran. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldita & Aminnudin, Hasni, Ulandari et al. yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah.
3. Pengaruh variabel monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran dengan nilai t hitung sebesar 1,646. Lebih kecil daripada nilai t table dengan signifikansi 0,05 dan nilai $df = 84 = 1,663$ nilai Sig. sebesar 0,104 atau lebih besar dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,127 sehingga Hipotesis ketiga dinyatakan ditolak. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel monitoring dan evaluasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel monitoring dan evaluasi (X3) tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Y). Monitoring anggaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Monitoring anggaran diperlukan untuk menggali dan mendapatkan informasi secara regular dengan indikator tertentu, dengan maksud apakah kegiatan yang sedang dilaksanakan berlangsung sesuai dengan perencanaan dan kebijakan awal yang telah disepakati. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa monitoring dan evaluasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap penyerapan anggaran yang terjadi di Pemrintah Daerah Kota Pekalongan.
4. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran dengan variabel moderating MOD1 (selisih mutlak pure $X1-Z$) signifikan dengan nilai koefisien regresi (standardized coefficients) sebesar -0.538 dengan nilai Signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar -0,485 sehingga Hipotesis keempat dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel perencanaan anggaran yang dimoderasi variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan variabel terhadap variabel penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Kesimpulan yang dapat diambil dari data diatas adalah variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak memberikan pengaruh yang kuat perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekalongan terhadap kemungkinan tingginya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Jika sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, maka pengaruh negative perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh tim anggaran dan tim anggaran PD terhadap penyerapan anggaran dapat dikurangi.
5. Pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran dengan variabel moderasi MOD2 (selisih mutlak pure $X2-Z$) signifikan dengan nilai koefisien regresi (standardized coefficients) sebesar 0,408 dengan nilai Sig. sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Hipotesis kelima dinyatakan diterima. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM yang dimoderasi variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan

terhadap variabel penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat memperkuat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Kota Pekalongan terhadap kemungkinan tingginya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang penganggaran dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan factor utama yang mempengaruhi tingginya penyerapan anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi SDM dan monitoring dan evaluasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPKD) sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan adalah berpengaruh signifikan dan positif;
2. Pengaruh variabel kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan adalah berpengaruh signifikan dan positif;
3. Pengaruh variabel monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan adalah tidak berpengaruh signifikan;
4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel perencanaan anggaran dalam meningkatkan penyerapan anggaran.
5. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki kemampuan memoderasi hubungan atau pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel penyerapan anggaran. Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat memperkuat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Kota Pekalongan terhadap kemungkinan tingginya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Referensi :

- Aldita, A. F., & Muniruddin, S. (2018). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SDM, PEMAHAMAN ATAS SISTEM AKUNTANSI, LINGKUNGAN BIROKRASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN SKPD KOTA LANGSA. 3(1).
- Alumbida, D. I., Saerang, D. P. E., & Ilat, V. (2016). PENGARUH PERENCANAAN, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. ACCOUNTABILITY, 5(2), 141. <https://doi.org/10.32400/ja.14431.5.2.2016.141-151>
- Boediono. (2011, March 29). Boediono: Belum Ada Monitoring & Evaluasi Anggaran. OKezone Finance, 1.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen, 17(2), 117-134. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23: Vol. VIII (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Harahap, S. A. S., & Taufik, T. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). 10.
- Hasni, N. T. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG. 13.
- Hutapea, P., & Nuriana, T. (2008). Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis. Gramedia pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah Good Governance, Value For Money, Welfare State. (Ed. Terbaru) (1st ed.). Andi.
- Nanda, R. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). 1(1), 14.
- Permana, D. A., & Riharjo, I. B. (2017). PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY. 6, 18.
- Priatna, H., & Nuraisyah, E. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Desa se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 24.
- Putra, F. B., Kennedy, K., & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 14 No. 2 (2021), 221-230. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.4401>
- Raharjo, E. (2007). TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI. 2(1), 10.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 10(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. M. (2019). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN INIVERSITAS SAM RATULANGI. JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23845.20.2.2019>
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati M., R. S. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DAYA SERAP ANGGARAN (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2016.v11.i01.p01>
- Santoso, S. (2006). Statistik Parametrik+ CD. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, D. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). Kupas tuntas penelitian akuntansi dengan SPSS. Pustaka Baru Press.
- Suliantoro, I. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 4(2), 16-30. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1025>
- Sumarsono, S. (2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Graha Ilmu.
- Taufik, T. (2013). PERAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Akuntansi, 1(2).
- Ulandari, V., Akram, A., & Santoso, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai

- Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 31(6), 1577.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i06.p18>
- Umar, H. (2013). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Rajawali.
- Zarinah, M., Darwanis, D., Si, M., Abdullah, D. S., & Si, M. (2016). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN ACEH UTARA. 8.